

Konstruksi Wacana Media terhadap Respons Publik dan Pemerintah atas Polemik Film Dokumenter Pesta Babi: Analisis Framing Robert N. Entman

Irafny*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Makassar

Email : irfany@unpacti.ac.id

Keyword: *Pesta Babi; media framing; digital public response; hybrid media ecosystem; networked counter-framing.*

Abstract: The controversy surrounding the screening of the documentary film Pesta Babi has triggered intense public discursive contestation between state security narratives and demands for freedom of expression. This study aims to analyze the discursive construction of the controversy by national online mass media, digital public responses, and the dynamics of framing surrounding the issue. Using a qualitative approach and Robert N. Entman's framing model, complemented by Drone Emprit digital data as a contextual comparison for understanding the dynamics of digital public responses, the study examines a corpus of 37 factual news articles from national online media and social media conversations published between 9 May and 13 June 2026. The findings show that media framing transformed dynamically across four analytical focuses: (1) the emergence of controversy and rejection of the film screening, which constructed a cultural issue as a security threat; (2) stakeholder responses and apparatus actions, which revealed fragmentation between official narratives and civil society coalitions; (3) a shift toward legal, privacy, and freedom-of-expression issues, marked by the movement of discourse toward personal legal matters, witness protection, and digital media ethics; and (4) the rearticulation of Papua-related issues, bringing together the government's developmentalist narrative and an ecological anti-colonial perspective. As a contextual comparison, Drone Emprit data indicate that the restriction of the film's screening coincided with increased digital public attention and the dominance of positive sentiment in online conversations, displaying characteristics consistent with the Streisand Effect. This pattern suggests that the top-down transmission of official narratives did not operate uniformly in the digital sphere, while digital public networks provided space for the emergence of networked counter-framing. Theoretically, this study extends Entman's framing perspective within the hybrid media ecosystem by highlighting the role of documentary cinema as a medium of social advocacy.

Kata Kunci: *Pesta Babi, Framing Media; Respons Publik Digital; Ekosistem Media Hibrida; Pembungkahan Tandangan Berbasis Jejaring.*

Abstrak: Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi memicu kontestasi wacana publik yang intens antara narasi keamanan negara dan tuntutan kebebasan ekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wacana media massa daring nasional dan respons publik siber serta dinamika pembungkahan (framing) yang terjadi di antara keduanya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Robert N. Entman serta data siber Drone Emprit sebagai pembanding kontekstual untuk memahami dinamika respons publik digital, riset ini menguji korpus 37 artikel berita faktual

dari media daring nasional serta percakapan media sosial pada rentang waktu 9 Mei hingga 13 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkai media massa bertransformasi secara dinamis melalui empat fokus analisis: (1) Fokus Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film, yang mengonstruksi isu kebudayaan menjadi ancaman keamanan; (2) Fokus Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat, yang memperlihatkan fragmentasi antara narasi otoritas dan koalisi masyarakat sipil; (3) Fokus pergeseran ke isu hukum, privasi, dan kebebasan berekspresi, yang ditandai pergeseran diskursus menuju ranah hukum personal, perlindungan saksi, serta etika media digital; serta (4) Fokus Reartikulasi Isu Papua, yang mempertemukan narasi developmentalisme pemerintah dengan anti-kolonialisme ekologis. Data Drone Emprit sebagai pembanding kontekstual menunjukkan bahwa pelarangan film berlangsung bersamaan dengan peningkatan atensi publik siber dan dominasi sentimen positif dalam percakapan digital, yang memperlihatkan karakteristik yang konsisten dengan Streisand Effect. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transmisi narasi otoritas secara top-down tidak berlangsung secara seragam dalam ruang digital, sementara jejaring publik digital menyediakan ruang bagi munculnya networked counter-framing. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka framing Entman pada ekosistem media hibrida dengan menegaskan peran sinem

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mengubah film dokumenter dari sekadar karya audiovisual menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik di ruang publik. Ketika sebuah film mengangkat isu sensitif, pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara publik memahami peristiwa, aktor, dan konflik yang menyertainya. Dalam proses tersebut, realitas yang hadir di ruang publik merupakan realitas yang telah melalui seleksi, penonjolan, dan interpretasi media (Berger & Luckmann, 1966; Tuchman, 1978). Entman (1993) menjelaskan bahwa proses tersebut berlangsung melalui framing, yakni pemilihan aspek tertentu dari realitas untuk ditonjolkan sehingga memengaruhi cara suatu masalah didefinisikan, penyebabnya dijelaskan, penilaian moral diberikan, dan penyelesaiannya diarahkan.

Konteks tersebut terlihat dalam polemik film dokumenter *Pesta Babi*. Pemberitaan mengenai film ini berkembang dari persoalan pemutaran dan isi film menuju respons pemerintah, aparat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Seiring perkembangan polemik, perhatian media juga bergerak ke isu kebebasan berekspresi, hukum, etika publik, perlindungan data pribadi, dan representasi Papua. Perubahan fokus tersebut menunjukkan bahwa konstruksi media terhadap sebuah kontroversi dapat berkembang mengikuti dinamika aktor dan peristiwa yang menyertainya.

Literatur mengenai *Pesta Babi* sejauh ini lebih banyak menempatkan film sebagai objek kajian. Yulianto dan Iskandar (2026) mengkaji representasi konflik melalui semiotika, Azizah dan Azizah (2026) membahas solastalgia dan kerusakan hutan adat, Silalahi dan Go (2026) menelaah hak ulayat masyarakat Papua, sedangkan Dewi dkk. (2026) mengkaji aspek moderasi beragama dalam film. Kajian-kajian tersebut penting untuk memahami film sebagai

teks budaya, tetapi belum banyak memperhatikan bagaimana media massa membangun wacana mengenai polemik dan respons para aktor setelah film hadir di ruang publik. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk menggeser perhatian dari film sebagai produk budaya menuju pemberitaan media sebagai arena konstruksi wacana.

Berdasarkan ruang kajian tersebut, riset ini bertujuan menganalisis bagaimana media massa daring di Indonesia mengonstruksi respons publik dan pemerintah terhadap polemik film dokumenter *Pesta Babi* menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Perhatian riset diarahkan pada perubahan bingkai pemberitaan sepanjang perkembangan polemik, mulai dari persoalan pemutaran film, respons para pemangku kepentingan, hingga berkembangnya isu hukum, privasi, kebebasan berekspresi, dan persoalan substantif mengenai Papua. Dengan pendekatan ini, riset tidak dimaksudkan untuk menentukan benar atau salahnya klaim dalam film maupun respons para aktor, melainkan untuk memahami bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengarahkan makna atas kontroversi tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Konstruksi Realitas Media dan Pembungkaman Diskursif

Dalam perspektif komunikasi massa kritis, pemberitaan media tidak pernah berdiri sebagai cermin netral yang merefleksikan realitas objektif, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial yang sarat kepentingan ideologis dan ekonomi politik. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses dialektis yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, di mana informasi yang disajikan media diolah menjadi fakta yang memperoleh legitimasi publik. Tuchman (1978) mempertegas bahwa berita merupakan realitas bentukan yang diproduksi melalui rutinitas organisasi media dan mekanisme kerja jurnalistik. Dalam konteks polemik produk budaya yang bermuatan isu sensitif, proses konstruksi ini sering kali memicu fenomena pembungkaman diskursif (*discursive silencing*). Huckin (2002) menyatakan bahwa pembungkaman diskursif bekerja ketika media secara halus meminggirkan, mengaburkan, atau menghilangkan aspek-aspek substantif dari suatu konflik melalui pemilihan konteks dan depolitisasi bahasa. Dengan demikian, media tidak hanya menentukan peristiwa mana yang layak diberitakan, tetapi juga secara aktif mengarahkan kognisi publik untuk mengabaikan dimensi ketidakadilan struktural yang semula diangkat oleh karya budaya tersebut.

Mekanisme pembungkaman ini beroperasi melalui representasi simetris yang semu, di mana media tampak memberikan ruang berimbang kepada seluruh pihak, namun secara teknis menggeser Fase utama dari isu pelanggaran hak esensial menjadi perdebatan formal administratif. Ketika narasi publik dialihkan dari pertanyaan mendasar mengenai keadilan sosial menuju proseduralisme hukum, media sesungguhnya sedang melakukan normalisasi atas situasi krisis. Dalam kerangka kerja ini, porsi pemberitaan yang besar terhadap polemik sekunder bertindak sebagai tabir yang mengikis sensitivitas publik terhadap masalah kebebasan sipil. Implikasi dari konstruksi ini menciptakan apa yang disebut sebagai marjinalisasi wacana, di mana suara kelompok terdampak secara bertahap tereliminasi dari diskursus arus utama.

Konvergensi Media dan Intermedia Agenda-Setting

Perkembangan ekosistem digital telah mengubah dinamika pembentukan wacana publik dari pola linier tunggal menjadi relasi konvergensi yang kompleks. McCombs dan Shaw (1972) dalam fondasi teori agenda-setting mengemukakan bahwa media memiliki kekuatan untuk mentransfer tingkat penonjolan suatu isu dari agenda media ke dalam agenda publik. Namun, dalam lanskap media kontemporer, penentuan agenda tidak lagi berlangsung satu arah. Harder, Sevenans, dan Van Aelst (2017) memperkenalkan konsep intermedia agenda-setting untuk menjelaskan bagaimana agenda pemberitaan media arus utama dan perdebatan di ruang siber saling memengaruhi dan saling mengamplifikasi. Berita yang dipublikasikan oleh media daring dapat memicu lonjakan percakapan di media sosial, dan sebaliknya, tekanan serta tren sentimen publik di platform digital mampu memaksa media arus utama untuk mengubah sudut pandang atau mengalihkan Fase pemberitaannya. Dalam konteks krisis komunikasi publik, proses intermedia agenda-setting ini sering kali dimanfaatkan oleh berbagai aktor untuk merebut narasi utama dan mendominasi pembentukan opini publik.

Interaksi dinamis antar-platform ini menciptakan siklus umpan balik yang mengakselerasi eskalasi maupun pengalihan isu dalam waktu yang relatif singkat. Media arus utama kerap memanfaatkan sentimen viral di platform digital sebagai indikator nilai berita, sementara pengguna media sosial mengutip laporan media formal untuk memperkuat legitimasi argumen mereka di ruang siber. Dalam situasi polemik, keterlibatan aktif jejaring publik digital ini tidak selalu menghasilkan demokratisasi informasi, melainkan dapat memicu fragmentasi diskursus. Ketika pembingkai media arus utama dan percakapan siber saling bertautan, arah wacana publik menjadi sangat rentan terhadap manipulasi agenda yang didorong oleh tingginya volume percakapan atas isu-isu yang bersifat sensasional.

Model Analisis Framing Robert N. Entman

Untuk mengoperasionalkan analisis wacana dalam teks berita, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi terhadap aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan untuk dibuat lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga mendorong cara pandang spesifik dalam memahami suatu isu. Skema Entman bekerja melalui empat fungsi utama yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah mendefinisikan masalah, yaitu bagaimana media mengidentifikasi hakikat peristiwa atau konflik yang sedang terjadi. Fungsi kedua adalah mendiagnosis penyebab, yakni menentukan aktor atau kekuatan pemicu yang dianggap bertanggung jawab atas munculnya masalah tersebut. Fungsi ketiga adalah membuat penilaian moral, di mana media menyisipkan norma, etika, atau nilai kognitif untuk mengonstruksi legitimasi tindakan para aktor. Fungsi keempat adalah menawarkan rekomendasi penyelesaian, yang memetakan arah solusi atau tindakan yang harus diambil untuk mengakhiri polemik. Dalam riset ini, keempat elemen Entman tidak hanya diterapkan secara statis pada teks tunggal, melainkan digunakan secara dinamis untuk melacak perubahan cara pandang media di setiap fase eskalasi isu.

Penerapan skema Entman memberikan ketelitian metodologis untuk membongkar bagaimana pilihan bahasa, struktur sintaksis, dan penempatan kutipan narasumber bekerja secara terpadu membentuk pandangan dunia tertentu bagi pembaca. Melalui penetapan batas-batas pendefinisian masalah dan alokasi kesalahan, media secara implisit mengarahkan ekspektasi publik terhadap hasil akhir dari suatu konflik. Penilaian moral yang disisipkan

dalam narasi berita sering kali tidak disampaikan secara langsung, melainkan dikonstruksi melalui pemilihan diksi yang memiliki nada emosional atau asosiasi nilai tertentu. Pada akhirnya, rekomendasi penyelesaian yang ditonjolkan media membatasi cakupan solusi yang dianggap rasional oleh publik, sehingga membatasi ruang bagi alternatif penyelesaian yang lebih adil dan holistik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menerapkan desain analisis framing media berbasis teks dan data digital, untuk membedah konstruksi wacana pemberitaan serta dinamika percakapan publik terkait polemik film Pesta Babi. Pengumpulan data teks berita dilakukan melalui pengarsipan dokumen digital yang mencakup judul, teras berita, tubuh berita, hingga petikan narasumber, sedangkan data digital sekunder dihimpun dari laporan Drone Emprit.

Kerangka analisis Robert N. Entman (1993) ditempatkan sebagai pilar utama untuk mengurai struktur internal teks berita melalui empat elemen kunci, yaitu Define Problems (pendefinisian masalah), Diagnose Causes (diagnosis penyebab), Make Moral Judgment (penilaian moral), dan Suggest Remedies (rekomendasi penyelesaian). Sementara itu, data percakapan siber dari Drone Emprit dimanfaatkan sebagai data pembanding kontekstual untuk membaca tren volume, kata kunci dominan, serta jaringan aktor di media sosial. Integrasi kedua sumber data ini tidak ditujukan untuk membuktikan hubungan kausalitas, melainkan untuk memperbandingkan kecenderungan pembingkai media dengan dinamika wacana digital dalam kurun waktu yang sejajar. Hasil pengodean teks berita kemudian dibandingkan secara kontekstual dengan pergerakan wacana siber yang dipaparkan dari laporan Drone Emprit. Perbandingan ini secara khusus juga mencermati fenomena Streisand Effect, yakni ketika tindakan pembatasan atau pembubaran fisik oleh aparat justru memicu eskalasi perhatian dan dukungan publik yang meluas di media sosial.

Penelitian ini menggunakan korpus data dinamakan korpus pemberitaan. Korpus data terdiri dari 37 artikel berita faktual dari media massa daring nasional yang dipublikasikan pada rentang 9 Mei hingga 13 Juni 2026. Penarikan sampel secara purposif menerapkan kriteria inklusi yang mencakup variasi tipologi institusi media, meliputi kantor berita resmi seperti ANTARA, media berbasis komunitas sosio-keagamaan seperti NU Online, media independen kritis seperti Tempo, Kompas, Tirto, dan BBC News Indonesia, serta media sindikasi regional seperti Detik Sulsel dan Detik Kalimantan.

Untuk menangkap perubahan konstruksi wacana sepanjang perkembangan polemik, korpus pemberitaan tidak dikelompokkan berdasarkan pembagian waktu yang bersifat kronologis dan eksklusif, melainkan berdasarkan fase analitis yang ditentukan dari dominasi isu, aktor, dan orientasi framing dalam teks. Setiap teks terlebih dahulu dianalisis menggunakan empat fungsi framing Entman, Hasil pengodean kemudian dibandingkan secara iteratif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perubahan orientasi wacana antarteks.

Berdasarkan proses tersebut, 37 korpus data dikelompokkan ke dalam empat fase analitis, yaitu (1) munculnya polemik dan penolakan pemutaran film, (2) respons pemangku kepentingan dan tindakan aparat, (3) pergeseran ke isu hukum, privasi, dan kebebasan berekspresi, serta (4) reartikulasi isu substantif Papua. Dengan demikian, kategori fase tidak dimaksudkan sebagai periode waktu yang sepenuhnya terpisah, karena satu peristiwa atau

bingkai dapat muncul secara tumpang tindih dalam waktu yang berdekatan. Fase analitis digunakan untuk menunjukkan trajektori yang bergerak runtut dari konstruksi kontroversi awal hingga reartikulasi isu substantif ini menjadi fondasi utama dalam menjelaskan dinamika transformasi framing media secara komprehensif.

Kerangka operasionalisasi analisis ini selanjutnya disajikan dalam Tabel 1 sebagai acuan baku dalam memetakan hasil penelitian dan membimbing arah pembahasan.

Tabel 1. Operasionalisasi Analisis Framing Berdasarkan Fase Pemberitaan

Fase Pemberitaan	Define Problems	Diagnose Causes	Make Moral Judgment	Suggest Remedies
Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film	Mengonstruksi pemutaran film dokumenter Pesta Babi sebagai ancaman terhadap stabilitas lokal, ketertiban umum, atau sensitivitas budaya dan keagamaan masyarakat.	Menempatkan penyelenggara pemutaran film, konten film yang kontroversial, atau ketiadaan izin resmi sebagai pemicu utama kegaduhan publik.	Menilai pemutaran film sebagai tindakan yang tidak sensitif dan memprovokasi konflik sosial, atau sebaliknya memandang penolakan sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang terancam.	Mendorong penghentian pemutaran film, klarifikasi publik oleh penyelenggara, atau penegakan aturan administratif oleh pihak berwenang.
Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat	Mendefinisikan intervensi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai langkah penertiban keamanan atau sebagai bentuk tindakan represif terhadap ruang kebebasan sipil.	Memosisikan perbedaan tafsir hukum, eskalasi sentimen publik, atau tekanan organisasi masyarakat sebagai penyebab keterlibatan aparat.	Mengonstruksi legitimasi etis atau kritik atas tindakan aparat dalam menjaga ketertiban umum versus perlindungan hak asasi manusia dan karya seni.	Merekomendasikan dialog antar-aktor, penghormatan terhadap prosedur hukum, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan kebudayaan serupa.
Fase Pergeseran ke isu hukum, privasi, dan kebebasan berekspresi	Menggeser isu utama dari substansi film menuju perdebatan legalitas formal, pelanggaran UU ITE, ancaman privasi narasumber, serta polarisasi wacana di media sosial.	Menunjuk penyebaran konten tanpa izin di ruang digital, kejahatan siber, atau manipulasi opini oleh akun media sosial sebagai sumber krisis baru.	Menilai pelanggaran privasi digital dan penyebaran hoaks sebagai tindakan tidak etis yang merusak tatanan hukum digital dan ruang publik.	Mendorong tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran siber, penguatan literasi digital, serta pemulihan hak privasi aktor terdampak.
Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua	Mendefinisikan kembali polemik film sebagai pintu masuk bagi persoalan substantif	Menempatkan kebijakan pembangunan, proyek strategis, kerusakan lingkungan,	Menilai persoalan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Papua melalui pertentangan	Mendorong perhatian kembali pada persoalan substantif Papua, perlindungan hak masyarakat adat,

	mengenai Papua, lingkungan, tanah adat, pembangunan, dan kepentingan masyarakat lokal setelah perhatian pemberitaan bergeser ke persoalan privasi dan legalitas.	konflik kepentingan, serta persoalan penguasaan tanah dan sumber daya sebagai faktor struktural yang melatarbelakangi isu yang diangkat film.	antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, dan keadilan sosial.	keberlanjutan lingkungan, serta penyelesaian persoalan pembangunan melalui mekanisme yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
--	--	---	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film

Pemetaan Korpus Pemberitaan

Pemetaan korpus pemberitaan pada fase pertama ini memotret dinamika awal ketika karya dokumenter Pesta Babi bertransisi dari teks sinematik menjadi pemicu friksi sosial di berbagai daerah dan institusi. Selama periode liputan, media massa memposisikan peristiwa ini tidak sekadar sebagai aktivitas kebudayaan, melainkan sebagai perdebatan multi-faset yang mengeskalasi ke ranah hukum, akademis, hingga stabilitas keamanan.

Berikut adalah pemetaan sepuluh artikel berita utama yang membentuk korpus pemberitaan pada Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film:

Tabel 2. Korpus Pemberitaan Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film

N o.	Tanggal	Nama Media	Judul Berita	Fase Pemberitaan (Framing / Konstruksi Narasi)	Link
1	11 Mei 2026	Tirto.id	Apa isi film dokumenter Pesta Babi sampai nobarnya dibubarkan ?	Pembangkaian muatan materi film sebagai pemicu utama timbulnya resistensi publik dan tindakan pembatalan di lapangan.	https://tirto.id/apa-isi-film-dokumenter-pesta-babi-sampai-nobarnya-dibubarkan-hvVS
2	12 Mei 2026	Aktual.com	Polemik film Pesta Babi memanas, DPR RI siapkan rapat khusus	Konstruksi narasi pergeseran penolakan dari ranah lokal menjadi isu nasional	https://aktual.com/polemik-film-pesta-babi-memanas-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-siapkan-rapat-khusus/

				yang eskalatif sehingga memerlukan intervensi politik parlemen.	
3	12 Mei 2026	Tempo.co	Nobar Pesta Babi puan kalau sensitive harus diantisipasi	Pembingkaiannya penolakan berbasis kewaspadaan atas potensi kerawanan sosial dan sensitivitas komunal dari sudut pandang elite politik.	https://www.tempo.co/politik/nobar-pesta-babi-puan-kalau-sensitif-harus-diantisipasi-2135318
4	12 Mei 2026	Tirto.id	Puan Soal Larangan Nobar Film Pesta Babi: Akan Ditindaklanjuti	Framing politis yang menyoroti desakan publik dan respons legislatif dalam menyikapi fenomena penolakan pemutaran film secara sistematis.	https://tirto.id/puan-soal-larangan-nobar-film-pesta-babi-akan-ditindaklanjuti-hv1S
5	13 Mei 2026	Tempo.co	Keliruan narasi agenda nonton bareng film Pesta Babi hanya hoaks	Pembingkaiannya distorsi informasi di mana polemik dipicu atau diperkeruh oleh penyebaran disinformasi mengenai penyelenggaraan acara nobar.	https://www.tempo.co/cekfakta/keliruan-narasi-agenda-nonton-bareng-film-pesta-babi-hanya-hoaks-2135549
6	14 Mei 2026	Tirto.id	Alasan ISBI Bandung Larang Pemutaran Film Dokumenter Pesta Babi	Konstruksi pembenaran institusi akademis dalam melakukan pelarangan demi menjaga netralitas	https://tirto.id/alasan-isbi-bandung-larang-pemutaran-fil

				dan stabilitas lingkungan kampus.	
7	18 Mei 2026	Tirto.id	Alasan Penundaan Nobar Film Pesta Babi di Unpad Meski Ada Izin	Pembangkaian konflik institusional kampus yang memposisikan penundaan akibat tekanan eksternal dan kekhawatiran gangguan ketertiban.	https://tirto.id/alasan-penundaan-nobar-film-pesta-babi-di-unpad-meski-ada-izin-hwfn
8	20 Mei 2026	ANTARA	Pengamat: PSN Wanam harus berlanjut karena tak terkait film Pesta Babi	Konstruksi pembatasan polemik dengan memisahkan secara tegas antara dinamika penolakan film dan keberlanjutan program pembangunan pemerintah.	https://www.antaranews.com/berita/5574308/pengamat-psn-wanam-harus-berlanjut-karena-tak-terkait-film-pesta-babi
9	29 Mei 2026	Tempo.co	Pesta Babi oligarki otonomi daerah	Framing kritis yang menempatkan polemik penolakan film sebagai cerminan dari relasi kuasa oligarki di tingkat pemerintahan daerah.	https://www.tempo.co/kolom/pesta-babi-oligarki-otonomi-daerah-2138696
10	31 Mei 2026	NU Online	Pesta Babi' di Pesantren: Ruang Belajar Santri Memahami Toleransi, Dampak Sosial Ekologis hingga Wajah Pemerintah	Pembangkaian positif atas potensi benturan narasi dengan menghadirkan perspektif alternatif berbasis ruang dialog keagamaan dan edukasi publik.	https://nu.or.id/daerah/pesta-babi-di-pesantren-ruang-belajar-santri-memahami-toleransi-dampak-sosial-ekologis-hingga-wajah-pemerintah-yCZQr

Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa korpus pemberitaan media massa tidak bergerak secara linier, melainkan terpolarisasi ke dalam beberapa spektrum konstruksi isu. Media independen dan kritis seperti Tempo.co dan Tirto.id secara konsisten mengeksplorasi penolakan pemutaran film dari sudut pandang kebebasan akademis, tekanan eksternal, dan relasi kuasa oligarki lokal. Sebaliknya, media berjejaring nasional seperti ANTARA menerapkan strategi pembatasan isu (issue containment) untuk mendisosiasikan polemik film dari keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, media berbasis komunitas keagamaan seperti NU Online menghadirkan narasi inklusif yang mendekomposisi friksi menjadi ruang dialog publik. Keberagaman perspektif ini mengindikasikan bahwa fenomena penolakan pemutaran film diproduksi melalui pertarungan wacana antara kekhawatiran atas stabilitas sosial dan desakan keterbukaan informasi.

Analisis Pembingkai (Framing) Elemen Entman dan Pembentukan Wacana

Untuk membedah secara rinci bagaimana media merajut narasi-narasi di atas, keseluruhan artikel pada Tabel 2 dianalisis menggunakan perangkat framing Robert N. Entman. Empat Elemen kognitif Entman disintesis pada tabel berikut:

Tabel 3 Matriks Sintesis Analisis Framing Elemen Entman pada Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film

Perangkat Framing (Entman)	Manifestasi Narasi dalam Media	Dampak Diskursif pada Isu
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Pemutaran film dinilai memicu sensitivitas sosial, gangguan keamanan kampus, dan disinformasi digital.	Menggeser esensi film dari karya seni/kritik sosial menjadi threat (ancaman) ketertiban publik.
Diagnose Causes (Penyebab Masalah)	Adanya muatan sensasional dalam film, ketidaksiapan pengelola tempat, serta kontestasi kepentingan politik lokal.	Menempatkan penyelenggara nobar dan muatan film sebagai pemicu utama kegaduhan.
Make Moral Judgments (Keputusan Moral)	Pelarangan dianggap wajar demi stabilitas, namun di sisi lain dinilai membendung kebebasan akademik.	Terjadinya polarisasi antara narasi "penjaga keharmonian" versus "penjaga kebebasan berekspresi".
Suggest Remedies (Penanganan Masalah)	Pembatalan izin, perumusan rapat khusus DPR RI, pembatasan narasi hoaks, dan alih fungsi menjadi ruang dialog keagamaan.	Mendorong solusi kelembagaan/top-down ketimbang dialog terbuka antar-warga.

Berdasarkan sintesis matriks elemen Entman pada Tabel 3 pembentukan wacana (discourse construction) oleh media massa pada Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film, bekerja melalui dua mekanisme artikulasi utama:

Konstruksi Wacana "Ancaman Stabilitas dan Ketertiban Umum" (Security and Order Discourse):

Melalui artikulasi elemen Define Problems dan Diagnose Causes, media arus utama secara dominan mengonstruksi pemutaran film bukan lagi sebagai Diskursus Kebudayaan, melainkan sebagai sumber kerawanan publik (security risk). Penggunaan artikulasi kosa kata seperti "sensitif", "antisipasi", dan "penundaan izin" memindahkan perhatian publik dari substansi materi film (kerusakan lingkungan dan proyek ekstraktif) menuju prosedur

administrasi dan potensi konflik sosial. Pilihan framing ini secara ideologis melegitimasi pembatalan izin dan intervensi aparat penegak hukum sebagai tindakan rasional demi ketertiban.

Konstruksi Wacana "Penyempitan Ruang Kebebasan Akademis" (Democratic Rights Discourse):

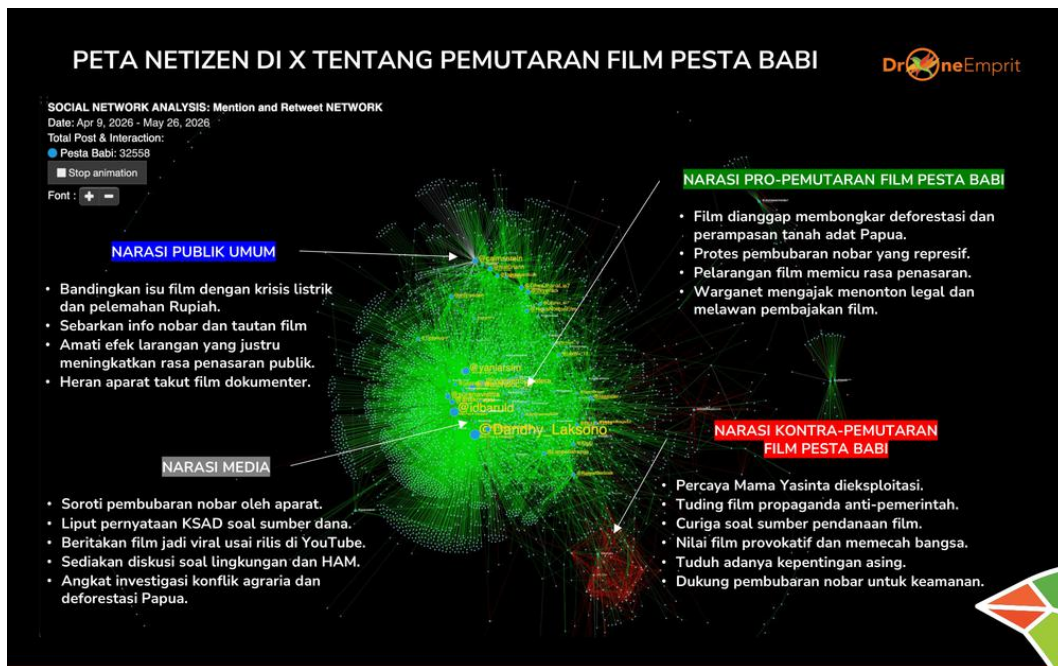
Melalui elemen Make Moral Judgments, media kritis membentuk wacana tandingan (counter-discourse) yang memposisikan penolakan dan pelarangan nobar di lingkungan kampus sebagai bentuk pembungkaman kebebasan sipil dan kebebasan akademik. Wacana ini membingkai penolakan bukan sebagai aspirasi murni masyarakat lokal, melainkan akibat dari intervensi struktur oligarki. Sementara itu, narasi alternatif dari NU Online merekonstruksi pemutaran film dari ranah konfrontatif menjadi instrumen edukasi toleransi dan keadilan sosio-ekologis.

Triangulasi Data Digital dan Implikasi Teoritis

Untuk membuktikan apakah konstruksi wacana yang dibentuk oleh media massa arus utama berbanding lurus dengan realitas penerimaan publik, penelitian ini menerapkan triangulasi data digital (digital triangulation). Mengacu pada konsep hybrid media system (Chadwick, 2017) dan networked framing (Papacharissi, 2015), wacana media tidak lagi berdiri tunggal, melainkan diuji dan direspons secara real-time oleh ekosistem media sosial. Data empiris pemantauan siber dari sistem Drone Emprit Academic (Fahmi, 2026) digunakan sebagai pembanding kontekstual melalui pengujian kuantitatif dan kualitatif di ruang digital.

Laporan Drone Emprit (periode 9 April–26 Mei 2026) mencatat total 1.883 artikel media online dan 31.820 sample mentions di media sosial yang membangkitkan 469.475.904 interaksi. Tindakan pembatasan fisik dan pembubaran nobar oleh aparat di lapangan justru memicu fenomena komunikasi politik Streisand Effect yaitu ketika upaya penyensoran justru melipatgandakan rasa penasaran publik. Hasilnya, sentimen publik di hampir seluruh platform digital didominasi oleh respon positif/dukungan (82,1% di Media Online; 83,0% di Twitter/X; 88,9% di TikTok; dan 80,8% di YouTube). Publik siber menolak wacana "ancaman keamanan" yang dibangun institusi lokal dan memilih memvalidasi materi film sebagai bentuk kritik sosial yang sah.

Sebagaimana terekam pada pemetaan Social Network Analysis (SNA) platform X pada Gambar 1, struktur jaringan aktor terbelah ke dalam empat kluster utama:



Gambar 1. Peta Netizen di X Tentang Pemutaran Film Pesta Babi Berdasarkan Social Network Analysis (Sumber: Drone Emprit Academic, Fahmi, 2026).

Pada Gambar 1 memvisualkan peta sosial network analisis netizen di platfom X/Twitter sebagai berikut:

Kelompok Pro-Pemutaran (@Dandhy_Laksono, @idbaruid, @watchdoc_ID): Menguasai volume percakapan terbesar dengan mengonsolidasikan wacana perlawanan terhadap represi aparat dan mendorong gerakan "bioskop warga".

Kelompok Kontra-Pemutaran (@neVerAlOnely__, @KagoyaSilas, @Opposite6888): Mereproduksi wacana stabilitas, tuduhan propaganda asing, dan mengamplifikasi polemik etika narasumber (Mama Yasinta).

Kelompok Media Arus Utama (@tempodotco, @tirtoID, @kompascom): Berfungsi sebagai bridging hubs yang mentransmisikan peristiwa pembubaran nobar ke skala nasional.

Kelompok Publik Umum (@okkymadasari, @direktoridosen): Menyuarakan keheranan atas sikap represif otoritas terhadap karya dokumenter.

Integrasi antara analisis framing Elemen Entman Fase Munculnya Polemik dan Penolakan Pemutaran Film dan data digital Drone Emprit ini memunculkan temuan krusial yaitu terjadi kesenjangan diskursif (discrepancy) yang tajam antara wacana fisik di lapangan dengan wacana dominan di ruang digital. Temuan ini mengonfirmasi teori cascading network activation dari Entman (2003). Bingkai "ketertiban umum" yang diupayakan oleh elite politik dan aparat tidak berhasil meluncur (cascade) mulus hingga ke tingkat massa digital. Sebaliknya, publik siber memanfaatkan platform digital sebagai alternative public sphere (Habermas, 1989) untuk mendatangkan pembingkai tandingan (counter-framing).

Fenomena bertahannya gerakan penayangan film melalui konsolidasi jaringan siber ini juga sejalan dengan kajian Irawanto & Octastefani (2019) mengenai cinematic activism, di

mana film dokumenter independen berhasil bertransformasi dari sekadar medium audio-visual menjadi simpul gerakan sosial pasca-reformasi di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian pada Fase pertama ini memperluas model Entman dengan membuktikan bahwa pada ekosistem media hibrida, dominasi top-down framing oleh institusi formal dapat dipatahkan secara masif oleh jejaring bottom-up networked publics.

Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat

Pemetaan Korpus Pemberitaan

Pemetaan korpus pemberitaan pada fase Respon Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat ini memotret eskalasi konflik ketika institusi negara, otoritas keamanan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penegak hak asasi manusia memberikan respons terbuka terhadap fenomena pembubaran pemutaran film Pesta Babi. Pemberitaan media pada Fase ini bergeser dari sekadar insiden pembatalan lokal menjadi benturan diskursif mengenai legitimasi tindakan aparat, kebebasan akademik, penegakan hukum, serta isu HAM nasional.

Berikut adalah pemetaan sepuluh artikel berita terpilih yang mewakili seluruh spektrum aktor pada Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat:

Tabel 4. Korpus Pemberitaan Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat

No	Tanggal	Nama Media	Judul Berita	Fase Pemberitaan (Framing / Konstruksi Narasi)	Link
1	9 Mei 2026	Detik Sulsel	Nobar film Pesta Babi di Ternate dibubarkan, AJI kecam	Pembungkai an represif tindakan aparat keamanan dalam membubarkan pemutaran film serta respon kecaman dari organisasi pers.	https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8481481/nobar-film-pesta-babi-di-ternate-dibubarkan-aji-kecam
2	11 Mei 2026	Tempo.co	YLBHI: Pembubaran nobar film Pesta Babi melanggar UUD 1945	Konstruksi hukum konstitusional yang memposisikan tindakan pembubaran oleh aparat sebagai	https://www.tempo.co/hukum/ylbhi-pembubaran-nobar-film-pesta-babi-melanggar-uud-1945-2135058

				pelanggaran atas hak sipil warga negara.	
3	12 Mei 2026	Tirto.id	TNI Klaim Bubarkan Nobar Pesta Babi Imbas Tak Berizin & Isu SARA	Konstruksi pembenaran militer (military justification) berbasis argumen prosedural administrasi dan pencegahan konflik komunal.	https://tirto.id/tni-klaim-bubarkan-nobar-pesta-babi-imbasm-tak-berizin-isu-sara-hv1P
4	12 Mei 2026	Tirto.id	Pigai: Pelarangan Nobar Film Harus Melalui Keputusan Pengadilan	Pembingkai an perlindungan HAM yang menegaskan batasan kewenangan aparat serta keharusan adanya penetapan peradilan (due process of law).	https://tirto.id/pigai-pelarangan-nobar-film-harus-melalui-keputusan-pengadilan-hv2Q
5	13 Mei 2026	Kompas.com	Sikap negara respons polemik nobar film Pesta Babi, pelarangan tak bisa dilakukan sembarangan	Framing yuridis-normatif yang menekankan pentingnya mekanisme hukum dan prosedur peradilan dalam membatasi ruang ekspresi publik.	https://nasional.kompas.com/read/2026/05/13/05394841/sikap-negara-respons-polemik-nobar-film-pesta-babi-pelarangan-tak-bisa
6	14 Mei 2026	ANTARA	Yusril: Pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan pemerintah	Pembatasan tanggung jawab elite eksekutif (disclaimer) dengan menegaskan bahwa	https://www.antaranews.com/berita/5568043

			h	pembubaran di daerah bukan kebijakan terpusat.	
7	19 Mei 2026	Tirto.id	KSAD soal Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana? Coba Pikir Aja	Pembingkai an kecurigaan institusional (institutional suspicion) yang mengarahkan narasi pada isu pendanaan dan dugaan motif asing di balik film.	https://tirto.id/ksad-soal-film-pesta-babi-duitnya-dari-mana-coba-pikir-aja-hwoy
8	21 Mei 2026	LLDIKTI Wilayah V	UMY soroti polemik film Pesta Babi, kritik sosial tak seharusnya dibungkam	Pembingkai an dari ranah akademis yang mengecam aksi pembungkaman terhadap mimbar kritik sosial dan kebebasan akademik kampus.	https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/umy-soroti-polemik-film-pesta-babi-kritik-sosial-tak-seharusnya-dibungkam
9	22 Mei 2026	Amnesty Internasional Indonesia	Pelarangan film Pesta Babi membungkam suara kritis tentang Papua	Konstruksi isu HAM yang mengaitkan tindakan pelarangan film dengan upaya penyensoran atas narasi keadilan sosio-ekologis di Papua.	https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pelarangan-film-pesta-babi-membungkam-suara-kritis-tentang-papua/05/2026/
10	25 Mei 2026	Detik Kalimantan	Nobar film Pesta Babi dibubarkan, Wawali	Pembingkai an lepas tangan pemerintah daerah	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8504812/nobar-film-pesta-babi-dibubarkan-wawali-tarakan-tak-ada-intervensi-pemkot

			Tarakan: Tak ada intervensi Pemkot	untuk menepis keterlibatan birokrasi lokal dalam tindakan pembatalan izin acara.	
--	--	--	---	---	--

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat, pola pemberitaan media memperlihatkan fragmentasi yang kontras antara klaim legitimasi otoritas negara dengan perlawanan hukum masyarakat sipil. Media nasional dan lokal seperti Detik Kalimantan, Detik Sulsel, dan ANTARA banyak mengamplifikasi wacana klarifikasi institusional baik dari pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun petinggi militer yang cenderung mendisosiasikan kebijakan pemerintah dari tindakan represif di lapangan. Sebaliknya, media kritis dan lembaga advokasi seperti Tempo.co, Tirto.id, YLBHI, Komnas HAM, dan Amnesty International Indonesia secara intensif membingkai tindakan pembubaran sebagai pelanggaran konstitusional terhadap pasal kebebasan berekspresi dalam UUD 1945, penyimpangan prosedur peradilan (due process of law), serta upaya pembungkaman suara kritis terkait isu Papua.

Analisis Pembingkai (Framing) Elemen Entman dan Pembentukan Wacana

Untuk mengurai dinamika konstruksi narasi antar-aktor pada Tabel 4, keseluruhan korpus berita dianalisis menggunakan perangkat framing Robert N. Entman (1993). Empat elemen kognitif Entman yang diekstrak dari artikulasi para pemangku kepentingan disintesis pada tabel berikut:

Tabel 5. Matriks Sintesis Analisis Framing Elemen Entman pada Fase Respons Pemangku Kepentingan

Perangkat Framing (Entman)	Manifestasi Narasi dalam Media	Dampak Diskursif pada Isu
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Aparat membingkai pemutaran film sebagai tindakan tanpa izin dan pemicu isu SARA; sementara koalisi sipil membinkainya sebagai tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power).	Terjadinya kontestasi definisi: antara isu "ketertiban administrasi" versus "pelanggaran hak asasi manusia".
Diagnose Causes (Penyebab Masalah)	Otoritas menuding ketidaklengkapan izin dan indikasi pendanaan asing; sedangkan masyarakat sipil menyalahkan sikap koersif aparat dan paranoia negara.	Mengalihkan substansi ekologis film menuju pembunuhan karakter (character assassination) pembuat film dan penyelenggara.
Make Moral Judgments (Keputusan Moral)	Pembubaran diklaim untuk menjaga keharmonisan wilayah; di sisi lain, tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan akademik.	Mengukuhkan polarisasi moral antara narasi "penjaga keharmonisan sosial" versus "rezim pembungkam kebebasan".
Suggest Remedies (Penanganan Masalah)	Aparat menekankan pentingnya kepatuhan perizinan; sedangkan lembaga	Mendorong desakan reformasi penegakan hukum dan penegasan batasan

	HAM menuntut jaminan keamanan pemutaran serta penetapan lewat pengadilan.	kewenangan militer di ranah sipil.
--	---	------------------------------------

Berdasarkan sintesis matriks elemen Entman pada Tabel 5, pembentukan wacana (discourse construction) oleh media massa pada Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat, bekerja melalui dua pola konstruksi utama:

Konstruksi Wacana "Defensif-Legitimatis State-Led Framing" (Institutional Defense Discourse):

Otoritas keamanan dan pejabat publik mengonstruksi wacana penertiban berbasis alasan prosedural dan stabilitas regional. Pernyataan pihak TNI mengenai kekhawatiran isu SARA serta ketiadaan izin, diimbangi oleh retorika kecurigaan pimpinan militer ("Duitnya dari mana?"), membentuk wacana sekuritisasi yang mengarahkan pandangan publik bahwa film Pesta Babi merupakan ancaman berdimensi geopolitik/propaganda. Di saat yang sama, klarifikasi dari tingkat eksekutif pusat (Yusril) dan pemerintah daerah (Wawali Tarakan) menciptakan wacana institutional washing, di mana pembubaran di lapangan dikonstruksi sebagai inisiatif lokal non-instruksional untuk melepaskan tanggung jawab politik di tingkat nasional.

Konstruksi Wacana "Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia" (Human Rights & Constitutional Discourse):

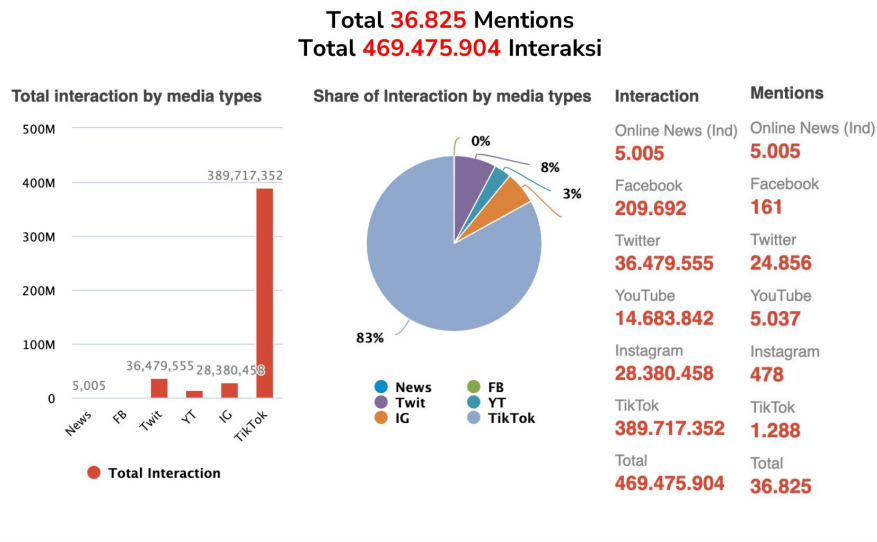
Sebagai bentuk tandingan (counter-discourse), kelompok masyarakat sipil (YLBHI, AJI, Komnas HAM, Amnesty International, serta akademisi UMY) mengonstruksi wacana pembubaran film sebagai tindakan ilegal yang menganggangi Konstitusi UUD 1945. Penegasan dari Natalius Pigai dan Komnas HAM bahwa pembatasan karya seni harus melalui keputusan peradilan (due process of law) merekonstruksi tindakan aparat dari status "penjaga keamanan" menjadi "pelanggar hukum". Wacana ini secara efektif mengembalikan diskursus publik pada isu penindasan suara kritis masyarakat adat Papua dan penyempitan ruang demokrasi sipil.

Triangulasi Data Digital dan Implikasi Teoritis

Untuk memvalidasi bagaimana benturan wacana antara otoritas negara dan kelompok masyarakat sipil direspons oleh massa digital, penelitian ini menerapkan triangulasi data digital berbasis Social Network Analysis (SNA) menggunakan riset Drone Emprit Academic (Fahmi, 2026) sebagai perbandingan kontekstual dilakukan dengan memantau lintas platform (Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Media Online) sepanjang periode 9 April hingga 26 Mei 2026. Dalam kerangka hybrid media system (Chadwick, 2017) dan networked framing (Papacharissi, 2015), narasi defensif yang dibangun oleh otoritas melalui media arus utama diuji daya tahannya di ruang publik siber.

Guna memetakan sejauh mana isu ini menyita perhatian publik di ruang digital, analisis diawali dengan melihat akumulasi sebaran volume pemicu serta tingkat keterlibatan warganet di berbagai jejaring media sosial. Besarnya skala keterlibatan publik tersebut terekam dalam sebaran volume dan interaksi berikut:

VOLUME DAN INTERAKSI



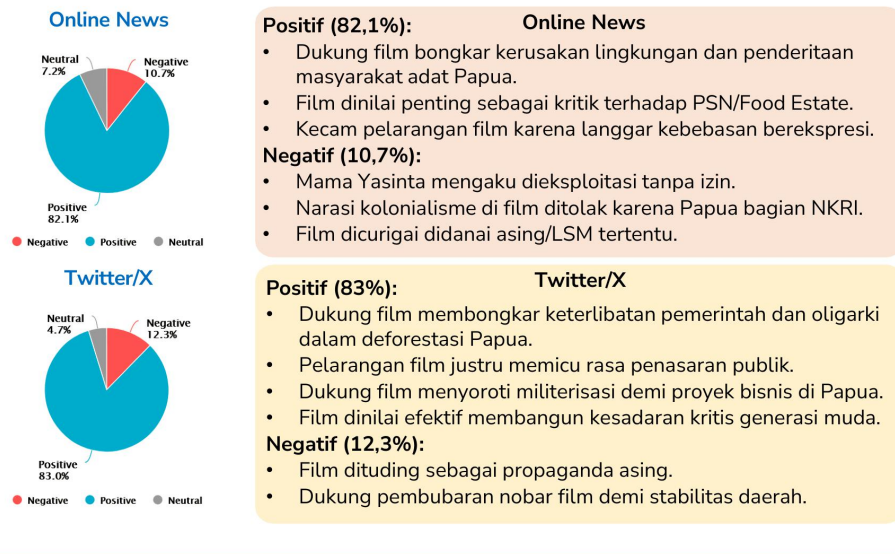
Gambar 2. Distribusi Volume Mentions dan Total Interaksi Publik Lintas Platform Media Sosial (Sumber: Laporan Drone Emprit Academic, 2026)

Berdasarkan data kuantitatif siber yang terekam pada Gambar 2, perbincangan mengenai film Pesta Babi memicu akumulasi atensi publik yang sangat masif, yaitu menghasilkan 36.825 mentions dengan total 469.475.904 interaksi. Platform TikTok menjadi pendorong interaksi terbesar (389,7 juta interaksi), disusul Twitter/X (36,4 juta interaksi), Instagram (28,3 juta interaksi), dan YouTube (14,6 juta interaksi).

Tingginya angka interaksi tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas isu, melainkan juga memperlihatkan arah penerimaan serta keberpihakan warganet terhadap narasi yang diusung oleh masing-masing pihak. Untuk membedah peta penerimaan publik terhadap wacana resmi pemerintah versus narasi kritis masyarakat sipil, kecenderungan respons digital tersebut dirincikan melalui pemetaan sentimen pada Gambar 3:

ANALISIS SENTIMEN /1

DroneEmprit



Gambar 3. Analisis Sentimen/1. Analisis sentiment Publik pada Platform Twitter/X dan Media Online (Sumber: Laporan Drone Emprit Academic, 2026)

Dari sisi analisis sentimen pada Gambar 3, upaya otoritas untuk mengonstruksi wacana "tertib administrasi" dan "pencegahan konflik SARA" tidak berhasil mendominasi persepsi publik. Di platform Twitter/X, sentimen publik didominasi oleh sentimen positif sebesar 83,0% (yang merefleksikan dukungan terhadap kritik ekologis film dan kecaman atas pembubaran nobar), sementara sentimen negatif hanya mencapai 12,3% dan netral 4,7%. Kecenderungan serupa terlihat pada Media Online (82,1% positif vs 10,7% negatif), Instagram (81,6% positif), YouTube (80,8% positif), dan TikTok (88,9% positif). Pola seimbang hanya terjadi di Facebook (44,7% positif dan 44,7% negatif) akibat kuatnya isu tuduhan propaganda dan perdebatan etika.

Integrasi antara analisis framing elemen Entman Fase Respons Pemangku Kepentingan dan Tindakan Aparat dan data digital Drone Emprit pada gambar 2 dan 3, mengonfirmasi terjadinya fenomena Streisand Effect. Tindakan koersif dan pelarangan oleh aparat keamanan justru memicu "Forbidden Content Effect", yang melipatgandakan rasa penasaran publik. Alih-alih meredam diskursus, represivitas aparat mentransformasi pemutaran film lokal menjadi gerakan konsolidasi sipil lintas daerah melalui "bioskop warga" dan lonjakan tontonan masif saat film diunggah secara resmi di YouTube.

Dalam teori cascading network activation (Entman, 2003), upaya elite pemerintah dan aparat keamanan untuk mengendalikan narasi dari atas ke bawah ternyata menemui jalan buntu (cascade blockage). Di ruang siber, publik tidak menelan mentah-mentah klaim resmi negara, melainkan secara aktif membedahnya dan menjadikan platform digital sebagai ruang publik alternatif (Habermas, 1989). Fenomena ini memperlihatkan bahwa di era media hibrida saat ini, tindakan tegas atau represif aparat di lapangan tidak bisa lagi dibenarkan begitu saja lewat satu narasi tunggal. Narasi tersebut akan dengan mudah dipatahkan oleh kekuatan jejaring publik digital yang saling terhubung (networked counter-publics).

Fase Pergeseran ke Isu Hukum, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi

A. Pemetaan Korpus Pemberitaan

Fase ketiga yakni pergeseran ke isu hukum, privasi, dan kebebasan berekspresi yang melingkupi pascapemutaran film dokumenter Pesta Babi. Berbeda dari fase awal yang didominasi isu lingkungan hidup maupun pertentangan politik-keamanan, fase ini memperlihatkan pergeseran diskursus yang sangat signifikan menuju ranah hukum personal, perlindungan saksi, serta batasan etika dalam karya pers dan media digital. Pemetaan korpus pemberitaan media arus utama sepanjang Juni 2026 mencatat adanya artikulasi narasi yang tegang antara upaya kriminalisasi siber, pembelaan hak-hak pers, perlindungan tokoh adat, dan perselisihan privasi berbasis UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berikut adalah pemetaan sepuluh artikel berita terpilih yang mewakili seluruh spektrum aktor pada Fase Dinamika Siber, Isu Privasi, dan Legalitas:

Tabel 6. Korpus Pemberitaan Fase Pergeseran ke Isu Hukum, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi

N o	Tangg al	Media	Judul Berita	Link
1	29 Mei 2026	Tirto.id	Admin @TheKeru puk Jadi Tersangka UU ITE, Tidak Ditahan Penyidik	https://tirto.id/admin-atthekerupuk-jadi-tersangka-uu-ite-tidak-ditahan-penyidik-hzQE
2	30 Mei 2026	Tempo.co	Tim Pesta Babi Hormati Laporan Mama Yasinta ke Polisi	https://www.tempo.co/politik/tim-film-pesta-babi-hormati-laporan-mama-yasinta-ke-polisi-2139037
3	1 Juni 2026	Tempo.co	Problem Persetujua n Hukum Actor Film Dokumente r Pesta Babi	https://www.tempo.co/hukum/yasinta-moiwend-di-pesta-babi-2139221
4	2 Juni 2026	ANTARA	Polda Metro Dalami Laporan Pengambila n Data Pribadi Ilegal Mama Sinta	https://www.antaranews.com/berita/5590833/polda-metro-dalami-laporan-pengambilan-data-pribadi-ilegal-mama-sinta
5	3 Juni 2026	Kompas.c om	Dandhy Nilai Polemik	https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/03/08595441/dandhy-nilai-polemik-pelaporan-film-pesta-babi-menggeser-isu-papua

			Pelaporan Film Pesta Babi Menggeser Isu Papua	
6	3 Juni 2026	Tirto.id	Tidak Benar, Dandhy Laksono Temui Miliarder Amerika Serikat	https://tirto.id/tidak-benar-dandhy-laksono-temui-miliarder-amerika-serikat-hxi7
7	5 Juni 2026	ANTARA	LPSK Kaji Permohonan Perlindungan Tokoh Adat Papua Terkait Pesta Babi	https://www.antaranews.com/berita/5595751/lpsk-kaji-permohonan-perlindungan-tokoh-adat-papua-terkait-pesta-babi
8	6 Juni 2026	IDN Times	Polemik Film Pesta Babi, Publik Dinilai Perlu Hormati Sikap Mama Sinta	https://www.idntimes.com/news/indonesia/polemik-film-pesta-babi-publik-dinilai-perlu-hormati-sikap-mama-sinta-00-jkxzp-fzvxt
9	7 Juni 2026	Tempo.co	Bisakah Pembuat Film Pesta Babi Digugat Memakai UU PDP	https://www.tempo.co/politik/uu-pers-data-pribadi-pesta-babi-2253329
10	11 Juni 2026	ANTARA	TNI Bantah Telah Menculik Mama Sinta	https://www.antaranews.com/berita/5604417/tni-bantah-telah-menculik-mama-sinta

Data korpus pemberitaan Fase Pergeseran ke Isu Hukum, Privasi, dan Kebebasan Berekspresi pada Tabel 6, memperlihatkan bagaimana isu polemik film Pesta Babi terurai ke dalam beberapa subnarasi hukum yang saling bertubrukan. Pemberitaan ANTARA dan Kompas.com menyoroti langkah kepolisian Polda Metro Jaya yang mengusut laporan tuntutan privasi Mama Yasinta Moiwend atas dugaan penggunaan data pribadi tanpa izin, yang oleh Dandhy Laksono dikritik sebagai bentuk pengalihan perhatian publik dari substansi krisis ekologi Papua. Sementara itu, media mendalam seperti Tempo.co memfokuskan liputan pada problematika doktrin hukum, khususnya benturan antara perlindungan data pribadi (UU PDP) dengan kebebasan pers (informed consent dalam dokumenter jurnalistik). Di sisi lain, Tirto.id, IDN Times, dan LPSK meliput dinamika eskalasi digital serta institusional, mulai dari penetapan tersangka admin @TheKerupuk melalui UU ITE, penangkalan berita bohong soal pendanaan asing, bantahan penculikan oleh TNI, hingga permohonan perlindungan saksi demi menjamin keamanan narasumber adat.

B. Analisis Pembangkaan (Framing) Elemen Entman dan Pembentukan Wacana

Untuk mengurai dinamika konstruksi narasi antar-aktor pada Tabel 6 Fase Pergeseran ke Isu Hukum, Privasi, dan Kebebasan Bereksprei, keseluruhan korpus berita dianalisis menggunakan perangkat framing Robert N. Entman. Empat elemen kognitif Entman yang diekstrak disintesis pada tabel berikut:

Tabel 7. Matriks Sintesis Analisis Framing Elemen Entman pada Fase Dinamika Siber, Isu Privasi, dan Legalitas

Elemen Framing Entman	Otoritas Kepolisian & Institusi Keamanan	Tim Pembuat Film & Komunitas Jurnalis	Kelompok Masyarakat Adat & Lembaga Perlindungan (LPSK)
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Timbulnya dugaan tindak pidana pengambilan data pribadi secara ilegal, pencemaran nama baik di media sosial, serta potensi gangguan ketertiban umum.	Terjadinya pergeseran isu (issue deflection) dari masalah pokok perampasan ruang hidup di Papua menuju perselisihan hukum individual.	Adanya kekecewaan atas penayangan Wajah/suara tanpa persetujuan yang jelas serta timbulnya rasa tidak aman akibat tekanan publik dan siber.
Diagnose Causes (Mendiagnosis Penyebab)	Pelanggaran prosedur perizinan penayangan konten narasumber dan unggahan bermuatan pelanggaran UU ITE oleh akun siber.	Kerentanan narasumber lokal terhadap intimidasi serta digunakannya celah hukum formal oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan karya advokasi.	Ketidakjelasan komitmen persetujuan (informed consent) di awal serta masuknya konflik media ini ke dalam pusaran kepentingan politik nasional.
Make Moral Judgement (Keputusan Moral)	Penegakan hukum atas laporan warga merupakan kewajiban konstitusional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu.	Karya pers dan dokumenter investigasi dilindungi undang-undang; kriminalisasi siber terhadap pembuat film dan warga membahayakan kebebasan sipil.	Hak-hak narasumber adat harus dihormati tanpa eksploitasi, dan keselamatan warga dari intimidasi pihak mana pun harus dijamin penuh oleh negara.
Suggest Remedies (Penanganan Masalah)	Memproses laporan polisi, memeriksa para saksi/terlapor, serta menetapkan tersangka bagi pelanggar UU ITE.	Menghormati proses hukum, menyerukan perlindungan bagi narasumber, dan mengajak publik Fase kembali pada Isu utama kerusakan lingkungan Papua.	Memproses permohonan perlindungan di LPSK, menghentikan polemik digital, dan mengimbau publik menghormati posisi hukum Mama Yasinta.

Berdasarkan sintesis matriks elemen Entman pada tabel 7, pembentukan wacana (discourse construction) oleh media massa pada Fase Pergeseran ke Isu Hukum, Privasi, dan Kebebasan Bereksprei bekerja melalui tiga pola konstruksi utama:

Konstruksi Wacana "Legal-Formalisme dan Sekuritisasi Siber" (Legal-Formalist & Cyber-Control Discourse)

Otoritas kepolisian dan instrumen penegak hukum mengonstruksi wacana penyidikan berbasis aduan tindak pidana privasi dan pelanggaran ITE. Penanganan laporan Mama

Yasinta oleh Polda Metro Jaya serta penetapan tersangka terhadap admin @TheKerupuk membentuk wacana tertib hukum yang mengarahkan pandangan publik bahwa kasus ini murni persoalan pidana individual dan etika penayangan data pribadi. Melalui konstruksi ini, tindakan tegas kepolisian dibenarkan sebagai langkah netral untuk menegakkan kepastian hukum dan menjaga ketertiban siber, sekaligus mengalihkan narasi dari isu rekam jejak aparat di lapangan.

Konstruksi Wacana "Kebebasan Pers dan Perlawanan Pengalihan Isu" (Press Freedom & Structural Counter-Discourse)

Sebagai bentuk tandingan (counter-discourse), tim pembuat film bersama komunitas jurnalis mengonstruksi wacana bahwa rentetan pelaporan polisi dan tuduhan pelanggaran UU PDP merupakan bentuk pergeseran isu (issue deflection) yang disengaja. Penegasan dari Dandhy Laksono bahwa polemik hukum ini mengaburkan pokok masalah perampasan tanah adat di Papua merekonstruksi posisi pembuat film dari status "terlapor/pelanggar privasi" menjadi "korban pembungkaman wacana". Wacana ini secara efektif berupaya mengembalikan diskursus publik pada esensi kritik ekologis dan mengonsolidasi dukungan warga siber atas karya pers investigatif.

Konstruksi Wacana "Perlindungan Hak Asasi dan Kerentanan Masyarakat Adat" (Human Rights & Adat Protection Discourse)

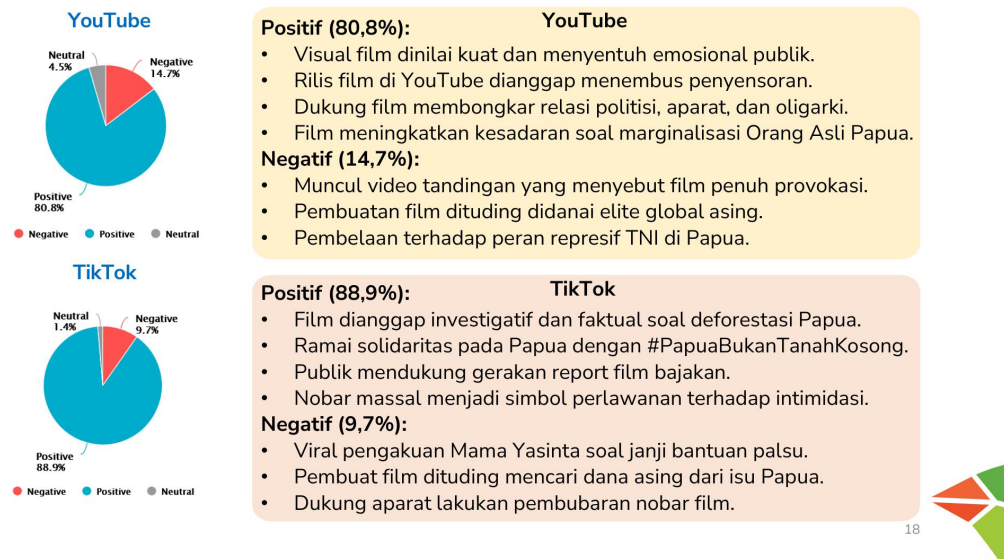
Satu pola wacana lain yang muncul secara independen dikonstruksi oleh LPSK, pendamping hukum, dan kelompok masyarakat adat. Wacana ini memfokuskan pandangan pada kerentanan posisi narasumber lokal di daerah konflik yang berada di antara tekanan kepentingan media dan ancaman intimidasi. Melalui pengajuan perlindungan ke LPSK serta seruan agar publik menghormati sikap Mama Yasinta, wacana ini merekonstruksi perselisihan dari sekadar perang narasi politik menjadi persoalan pemenuhan hak-hak asasi, keselamatan fisik, dan perlindungan etis bagi kelompok masyarakat adat yang rentan dieksploitasi.

Triangulasi Data Digital dan Implikasi Teoritis

Temuan analisis elemen Entman pada bagian sebelumnya mengonfirmasi adanya benturan narasi yang tajam antara legal-formalisme otoritas, advokasi kebebasan pers, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Untuk memvalidasi bagaimana kontestasi wacana tersebut direspons oleh publik luas di arena digital, dilakukan triangulasi data menggunakan temuan analisis sentimen dari Drone Emprit Academic (2026) pada platform berbasis audio-visual, yaitu YouTube dan TikTok sebagai pembanding kontekstual. Data digital ini memperlihatkan secara empiris bagaimana warganet merekonstruksi dan merespons isu-isu privasi, legalitas, serta tuduhan propaganda yang melingkupi pemutaran film Pesta Babi.

Pilihan platform audio-visual menjadi krusial karena medium ini memungkinkan gagasan disampaikan lewat bukti visual yang lebih intim dan berdampak emosional. Arah penerimaan serta resistensi warganet pada kedua platform tersebut terpetakan secara rinci dalam pembagian sentimen berikut:

ANALISIS SENTIMEN /3



Gambar 4. Analisis Sentimen/3. Analisis Sentimen Publik pada Platform Twitter/X dan Media Online (Sumber: Laporan Drone Emprit Academic, 2026)

Berdasarkan rekaman data digital pada Gambar 4, platform YouTube dan TikTok memperlihatkan dominasi dukungan publik yang sangat tinggi terhadap narasi pembongkaran krisis Papua, sekaligus merekam jejak pergeseran narasi yang dibangun oleh kelompok kontra. Pada platform YouTube, sentimen positif mencatatkan angka 80,8%, yang didorong oleh persepsi publik bahwa kekuatan visual film tersebut mampu menembus penyensoran serta membongkar relasi berkelindan antara politisi, aparat, dan oligarki di balik marginalisasi Orang Asli Papua. Sebaliknya, sentimen negatif di YouTube yang mencapai 14,7% terartikulasi melalui pemunculan video tandingan yang menuding film penuh provokasi, adanya tuduhan pendanaan oleh elite global asing, serta pembelaan terhadap tindakan tegas aparat keamanan.

Dinamika yang selaras namun lebih solid terlihat pada platform TikTok, di mana sentimen positif menembus angka 88,9%. Warganet di TikTok mengonstruksi film ini sebagai karya investigatif yang faktual mengenai deforestasi Papua, yang kemudian memicu aksi solidaritas masif melalui tagar #PapuaBukanTanahKosong serta menjadikan gerakan nonton bareng (nobar) massal sebagai simbol perlawanan terhadap intimidasi siber dan fisik. Di sisi lain, sentimen negatif sebesar 9,7% di TikTok tereskalasi akibat viralnya video pengakuan Mama Yasinta terkait janji bantuan yang dianggap tidak terenuhi, tuduhan pencarian dana hibah asing oleh pembuat film, serta dukungan atas pembubaran kegiatan nobar demi stabilitas keamanan.

Triangulasi data digital ini menegaskan bahwa konstruksi wacana "Legal-Formalisme dan Sekuritisasi Siber" oleh aparat yang memanfaatkan narasi klaim Mama Yasinta serta tuduhan dana asing, secara empiris berhasil diserap oleh sekitar 9% hingga 14% kelompok publik siber untuk mendiskreditkan integritas pembuat film. Namun demikian, narasi tandingan "Kebebasan Pers dan Perlawanan Pengalihan Isu" jauh lebih dominan memenangkan persepsi publik digital. Kehadiran bukti-bukti visual dan amplifikasi

solidaritas siber di YouTube dan TikTok terbukti mampu menetralsir upaya pengalihan isu (issue deflection), sehingga mayoritas warganet tetap mengaitkan kasus ini dengan substansi perampasan tanah adat dan represi kebebasan sipil.

Secara teoritis, pembandingan kontekstual melalui temuan triangulasi ini memperluas pemahaman kita mengenai konsep networked counter-publics (Jackson & Foucault Welles, 2015) dalam ekosistem komunikasi hibrida. Kasus ini membuktikan bahwa ketika institusi negara mencoba melakukan pembungkaman defensif melalui instrumen legalitas formal dan pengalihan isu privasi, jejaring publik digital mampu memanfaatkan platform berbasis audio-visual untuk membangun counter-framing yang kolektif. Publik siber tidak hanya bertindak sebagai konsumen informasi yang pasif, melainkan secara aktif mendekonstruksi narasi resmi negara dan mengubah platform siber menjadi ruang publik alternatif (alternative public sphere) untuk mengawal isu-isu keadilan lingkungan dan hak asasi manusia di Papua.

Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua

Pemetaan Korpus Pemberitaan

Fase keempat penelitian ini mendalami aspek substanti, hak asasi manusia, dan isu Papua yang melingkupi tayangan film dokumenter Pesta Babi. Berbeda dengan fase-fase sebelumnya yang menyoroti reaksi awal, tindakan aparat, maupun dinamika siber-hukum, Fase ini mengupas secara mendalam inti pesan kritis film—mulai dari krisis deforestasi, ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate, perampasan wilayah adat Orang Asli Papua (OAP), hingga narasi tandingan penyeragaman pembangunan oleh pemerintah pusat. Pemetaan korpus pemberitaan media arus utama sepanjang Mei hingga Juni 2026 memperlihatkan benturan narasi yang tajam antara wacana pertanahan/HAM dari kelompok masyarakat sipil, LSM, dan akademisi, berhadapan dengan wacana "pesta panen" dan ketahanan pangan nasional yang digaungkan oleh instansi pemerintah.

Berikut adalah pemetaan tujuh artikel berita terpilih yang mewakili seluruh spektrum aktor pada Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua:

Tabel 8. Korpus Pemberitaan Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua

N o	Tanggal	Media	Judul Berita	Link
1	16 Mei 2026	NU Online	Film Pesta Babi: Antara Pembangunan dan Kezaliman atas Tanah Adat	https://islam.nu.or.id/syariah/film-pesta-babi-antara-pembangunan-dan-kezaliman-atas-tanah-adat-nfiMl
2	23 Mei 2026	Tempo.co	Di Balik Layar Pesta Babi	https://www.tempo.co/teroka/di-balik-layar-pesta-babi-2137647
3	25 Mei 2026	Tempo.co	Proyek Food Estate Berlanjut Seiring Film Pesta Babi Meluas	https://www.tempo.co/lingkungan/film-pesta-babi-penambahan-alat-berat-food-estate-2138096
4	25 Mei	Kompas.co	Salah	https://nasional.kompas.com/read/2026/05/25/052429

	2026	m	Kaprah Menggugat Pesta Babi dan Etika Republik	51/salah-kaprah-menggugat-pesta-babi-dan-etika-republik?page=all
5	9 Juni 2026	Tempo.co	Sutradara Pesta Babi: Penjajahan Terparah Terjadi di Papua	https://www.tempo.co/wawancara/kolonialisme-di-papua-sutradara-film-pesta-babi-2253871
6	12 Juni 2026	ANTARA	Mentan Amran Fase Wujudkan "Pesta Panen" Pertanian di Papua	https://www.antaranews.com/berita/5605337/mentan-amran-fase-wujudkan-pesta-panen-pertanian-di-papua
7	26 Juni 2026	NU Online	Film Pesta Babi Bongkar Kerusakan Hutan Papua, Greenpeace Soroti Perampasan Tanah Adat demi PSN	https://nu.or.id/nasional/film-pesta-babi-bongkar-kerusakan-hutan-papua-greenpeace-soroti-perampasan-tanah-adat-demi-psn-eD0t4

Data Tabel 8 Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua, mengartikulasikan dua kutub utama dalam mengurai isu Papua pascapemutaran film. Media seperti NU Online, Tempo.co, dan Kompas.com membingkai tayangan film Pesta Babi sebagai alat bongkar atas kezaliman struktural, kerusakan ekologis masif demi PSN food estate, serta penafsiran ulang atas etika berpublik dan praktik kolonialisme modern di tanah Papua. Di sisi seberang, pemberitaan ANTARA menghadirkan wacana resmi pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang mengedepankan narasi optimisme "pesta panen" sebagai komitmen pembangunan welfare-state dan ketahanan pangan nasional di Papua, yang secara tidak langsung berusaha menutupi kritik perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Analisis Pembingkai (Framing) Elemen Entman dan Pembentukan Wacana

Untuk mengurai dinamika konstruksi narasi antar-aktor pada Tabel 8 Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua, keseluruhan korpus berita dianalisis menggunakan perangkat framing Robert N. Entman (1993). Empat elemen kognitif Entman yang diekstrak dari artikulasi para pemangku kepentingan disintesis pada tabel berikut:

Tabel 9. Matriks Sintesis Analisis Framing Elemen Entman pada Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua

Elemen Framing Entman	Pemerintah Pusat & Kementerian Sektoral	Jurnalis, Sutradara, & Koalisi LSM Lingkungan	Organisasi Keagamaan & Masyarakat Civil Society
Define Problems (Pendefinisian)	Keterbelakangan ekonomi dan	Ancaman ekosida, pembukaan 2,5 juta	Kezaliman struktural, pengabaian hak ulayat,

Masalah)	kerentanan ketahanan pangan nasional di kawasan timur Indonesia.	hektare hutan adat, dan perampasan ruang hidup OAP akibat ekspansi PSN food estate.	serta penurunan derajat kemanusiaan dan etika bernegara di Papua.
Diagnose Causes (Mendiagnosis Penyebab)	Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial di Papua serta lambatnya modernisasi sektor pertanian.	Kerjasama oligarki ekstraktif dan pemodelan pembangunan top-down berpendekatan militeristik/kolonial.	Kebijakan pembangunan yang mengabaikan kearifan lokal, etika hukum ulayat, dan prinsip-prinsip HAM mendasar.
Make Moral Judgement (Keputusan Moral)	Pembangunan pertanian skala besar merupakan ikhtiar luhur menciptakan kesejahteraan dan "pesta panen" bagi rakyat Papua.	Kerusakan ekologis masif dan pengusuran hak ulayat merupakan bentuk penindasan/kolonialisme modern yang tidak adil.	Mengabaikan jeritan masyarakat adat demi proyek ekstraktif adalah tindakan zalim yang menciderai etika kebangsaan dan nilai keagamaan.
Suggest Remedies (Penanganan Masalah)	Melanjutkan dan mempercepat proyek food estate dengan penambahan alat berat dan fasilitas produksi.	Menghentikan pembukaan lahan PSN, memulihkan hak ulayat OAP, serta menghormati independensi karya pers/dokumenter.	Evaluasi total kebijakan PSN di Papua, pengakuan sah hukum ulayat, serta pemulihan keadilan sosial bagi OAP.

Berdasarkan sintesis matriks elemen Entman pada Tabel 9, pembentukan wacana (discourse construction) oleh media massa pada Fase Reartikulasi Isu Substantif Papua bekerja melalui dua pola konstruksi utama:

Konstruksi Wacana "Developmentalisme dan Pesta Panen" (Developmentalist & State-Welfare Discourse): Pemerintah pusat melalui instansi teknis (seperti Kementerian Pertanian) mengonstruksi wacana bahwa kehadiran negara di Papua diwujudkan lewat program modernisasi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan. Penggunaan metafora "pesta panen" dimanfaatkan untuk membingkai ekspansi lahan sebagai investasi kesejahteraan, guna meng-counter gagasan destruktif yang disajikan oleh film Pesta Babi. Wacana ini melegitimasi pengerahan alat berat dan kelanjutan PSN food estate sebagai langkah logis demi mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah Papua.

Konstruksi Wacana "Anti-Kolonialisme Ekologis dan Keadilan Hak Ulayat" (Ecological Justice & Human Rights Counter-Discourse): Sebagai bentuk tandingan (counter-discourse), sutradara, koalisi LSM (Greenpeace), dan organisasi masyarakat keagamaan (NU Online) mengonstruksi wacana bahwa proyek PSN di Papua merupakan wujud nyata "kolonialisme modern" dan kezaliman atas tanah adat. Narasi pemberitaan merekonstruksi isu pembukaan lahan 2,5 juta hektare dari sekadar "pembangunan ekonomi" menjadi tindakan perampasan ruang hidup (land grabbing) dan kerusakan lingkungan (ecocide). Wacana ini mereposisi posisi Orang Asli Papua (OAP) dari sekadar "penerima manfaat pembangunan" menjadi "korban perampasan hak-hak mendasar", sekaligus menuntut pertanggungjawaban etika bernegara.

Triangulasi Data Digital dan Implikasi Teoritis

Temuan analisis elemen Entman pada pembentukan wacana (discourse construction) oleh media massa memperlihatkan bagaimana kontestasi antara narasi "Pesta Panen/ Developmentalisme" negara berbenturan keras dengan wacana "Kezaliman Tanah Adat /

Anti-Kolonialisme" masyarakat sipil. Untuk memvalidasi bagaimana benturan substansi ini direspons dan diamplifikasi oleh publik luas di arena digital, dilakukan triangulasi data menggunakan temuan Drone Emprit Academic (2026) sepanjang periode 9 April–26 Mei 2026 sebagai pembanding kontekstual

Kesimpulan data dalam Top Isu berkaitan dengan film Pesta Babi, merekam dua isu kerugian lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat memegang porsi dominan dalam menyita perhatian public yakni Pertama, Sorotan Kerusakan Lingkungan memvisualkan pendapat warganet mengecam keras rencana pembukaan lahan hutan adat seluas 2,5 juta hektare di Papua Selatan demi PSN food estate. Kedua, Gelombang Empati Digital berupa muncul kemarahan dan solidaritas masif atas keterancaman marginalisasi Orang Asli Papua (OAP), yang digelorakan secara kolektif lewat tagar #PapuaBukanTanahKosong.

Merujuk pada data analisis sentimen Drone Emprit Academic (2026) yang telah dipaparkan sebelumnya (Gambar 3), terlihat bahwa publik digital secara masif memihak pada narasi tandingan yang diusung oleh kelompok pro-masyarakat adat: Media Online & Twitter/X: Sentimen positif mencapai 82,1% di media online dan 83,0% di Twitter/X. Sentimen ini dipicu oleh besarnya dukungan publik terhadap pembongkaran kerusakan lingkungan, kecaman atas pelarangan nobar, dan kritik terhadap proyek food estate. TikTok & Instagram: Sentimen positif menembus 88,9% di TikTok dan 81,6% di Instagram. Generasi muda menggunakan platform ini untuk mengedukasi publik mengenai bentuk-bentuk kolonialisme modern di Papua serta memviralkan gerakan solidaritas. Sentimen Negatif (9,7% - 15,3%): Sentimen negatif yang berkisar pada angka kecil diisi oleh isu tuduhan propaganda anti-pemerintah, prasangka dana asing, dan klaim eksploitasi sosok Mama Yasinta.

Secara teoritis, temuan ini sangat relevan dengan pendekatan Political Ecology (Robbins, 2019) dan konsep Apolitical Ecology vs Critical Ecology. Pemerintah menggunakan pendekatan apolitical ecology yang memandang lahan Papua semata sebagai komoditas menganggur yang harus dioptimalkan demi "pesta panen" dan ketahanan pangan. Sebaliknya, film Pesta Babi dan masyarakat sipil berhasil mendorong perspektif critical political ecology, yang membongkar bahwa kebijakan ekologi dan agraria tidak pernah bebas dari relasi kuasa, kekuatan oligarki, serta marginalisasi kelompok rentan.

Temuan tringulasi ini sejalan dengan Agenda-Setting Theory (McCombs & Shaw, 1972) yang beroperasi secara bottom-up melalui Networked Framing (Meraz & Papacharissi, 2013). Upaya otoritas untuk menyalurkan wacana tunggal pembangunan diabaikan oleh warganet. Melalui amplifikasi tagar #PapuaBukanTanahKosong dan tagar perlawanan lainnya, publik siber berhasil memaksa isu keretakan ekologis dan pelanggaran hak ulayat di Papua menjadi public agenda utama yang menembus benteng sensor media arus utama. Hal ini membuktikan bahwa karya film dokumenter investigatif yang ditopang oleh gerakan digital mampu merebut kontrol atas narasi keadilan sosial dan keadilan lingkungan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis framing Robert N. Entman dan pemanfaatan data digital Drone Emprit sebagai pembanding kontekstual terhadap dinamika polemik film dokumenter Pesta

Babi, riset ini menunjukkan bahwa konstruksi wacana media massa daring nasional tidak bersifat statis, melainkan memperlihatkan perubahan orientasi framing yang dapat dipetakan melalui empat fokus analitis. Fokus tersebut meliputi munculnya polemik dan penolakan pemutaran film, respons pemangku kepentingan dan tindakan aparat, pergeseran perhatian ke isu hukum, privasi, dan kebebasan berekspresi, serta reartikulasi isu substantif Papua yang mempertemukan narasi developmentalisme pemerintah dengan perspektif ekologis dan kritik terhadap relasi kuasa atas wilayah Papua. Keempat fokus tersebut tidak dipahami sebagai tahapan kronologis yang bersifat eksklusif, melainkan sebagai orientasi wacana yang muncul dan dapat saling beririsan sepanjang perkembangan polemik.

Data Drone Emprit memberikan konteks mengenai dinamika percakapan publik digital yang berlangsung bersamaan dengan perubahan wacana media. Peningkatan perhatian dan dominasi sentimen positif dalam percakapan digital setelah munculnya tindakan pembatasan terhadap pemutaran film menunjukkan bahwa isu tersebut memperoleh visibilitas yang lebih luas di ruang digital. Pola ini memperlihatkan karakteristik yang konsisten dengan konsep Streisand Effect, tetapi tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal antara tindakan pembatasan dan peningkatan perhatian publik. Demikian pula, dinamika jejaring percakapan digital menunjukkan bahwa transmisi narasi otoritas tidak berlangsung secara seragam. Narasi tandingan mengenai kebebasan berekspresi, keadilan lingkungan, dan hak Orang Asli Papua memperoleh ruang artikulasi dalam jejaring publik digital. Dalam konteks ini, konsep cascading network activation dapat digunakan sebagai perspektif interpretatif untuk memahami mengapa narasi otoritas tidak selalu diterima secara seragam dalam ekosistem media hibrida.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya kajian framing dengan menunjukkan bahwa konstruksi media terhadap kontroversi dapat mengalami perubahan orientasi ketika isu, aktor, dan arena konflik berkembang. Perubahan tersebut memperlihatkan pola discursive displacement dan rearticulation: perhatian terhadap persoalan substantif Papua sempat bergeser ke persoalan hukum, privasi, dan konflik antarpersonal, sebelum kembali diartikulasikan melalui isu ekologis, tanah adat, dan pembangunan. Dengan demikian, film dokumenter dalam kontroversi ini tidak hanya hadir sebagai produk audiovisual, tetapi juga menjadi titik artikulasi berbagai wacana sosial, politik, dan lingkungan yang terus dinegosiasikan dalam ekosistem media hibrida.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktual.com. (2026, 12 Mei). Polemik film Pesta Babi memanaskan, DPR RI siapkan rapat khusus. <https://aktual.com/polemik-film- pesta-babi-memanas-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-siapkan-rapat-khusus/>
- Amnesty International Indonesia. (2026, 22 Mei). Pelarangan film Pesta Babi membungkam suara kritis tentang Papua. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pelarangan-film- pesta-babi-membungkam-suara-kritis-tentang-papua/05/2026/>
- ANTARA. (2026, 14 Mei). Yusril: Pembubaran nobar film Pesta Babi bukan arahan pemerintah. <https://www.antaranews.com/berita/5568043>

- ANTARA. (2026, 20 Mei). Pengamat: PSN Wanam harus berlanjut karena tak terkait film Pesta Babi. <https://www.antaraneews.com/berita/5574308/pengamat-psn-wanam-harus-berlanjut-karena-tak-terkait-film-pesta-babi>
- ANTARA. (2026, 2 Juni). Polda Metro dalam laporan pengambilan data pribadi ilegal Mama Sinta. <https://www.antaraneews.com/berita/5590833/polda-metro-dalam-laporan-pengambilan-data-pribadi-ilegal-mama-sinta>
- ANTARA. (2026, 5 Juni). LPSK kaji permohonan perlindungan tokoh adat Papua terkait Pesta Babi. <https://www.antaraneews.com/berita/5595751/lpsk-kaji-permohonan-perindungan-tokoh-adat-papua-terkait-pesta-babi>
- ANTARA. (2026, 11 Juni). TNI bantah telah menculik Mama Sinta. <https://www.antaraneews.com/berita/5604417/tni-bantah-telah-menculik-mama-sinta>
- ANTARA. (2026, 12 Juni). Mentan Amran fokus wujudkan "pesta panen" pertanian di Papua. <https://www.antaraneews.com/berita/5605337/mentan-amran-fokus-wujudkan-pesta-panen-pertanian-di-papua>
- Azizah, L. N., & Azizah, N. (2026). Representasi solastalgia dan distress lingkungan dalam film dokumenter Pesta Babi: Analisis konten kualitatif berbasis ekopsikologi. *Journal of Society Counseling*, 4(2), 518–527. <https://doi.org/10.59388/josc.v4i2.908>
- BBC News Indonesia. (2026, 14 Mei). Film Pesta Babi: Pembubaran pemutaran di sejumlah daerah memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8p5vd21q8o>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Detik Kalimantan. (2026, 25 Mei). Nobar film Pesta Babi dibubarkan, Wawali Tarakan: Tak ada intervensi Pemkot. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8504812/nobar-film-pesta-babi-dibubarkan-wawali-tarakan-tak-ada-intervensi-pemkot>
- Detik Sulsel. (2026, 9 Mei). Nobar film Pesta Babi di Ternate dibubarkan, Aji kecarn. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8481481/nobar-film-pesta-babi-di-ternate-dibubarkan-aji-kecam>
- Dewi, V. A., Azizah, L. Z., Ghaida, S. A., Iffatin, Y. S., Musakinah, D. A., Isnaini, R. F., Fernanda, M. D., Mukti, T. A., & Prayogi, A. (2026). Moderasi beragama, pendidikan Islam, dan kolonialisme budaya dalam film Pesta Babi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 3(7), 4886–4894. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/7596>

- Drone Emprit. Fahmi. I (2026). Sentimen publik terhadap pemutaran film Pesta Babi: Laporan analisis media sosial & online news <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-pemutaran-film-pesta-babi>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2003). Cascading activation: Contesting the White House's frame after 9/11. *Political Communication*, 20(4), 415–432. <https://doi.org/10.1080/10584600390244176>
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962). <https://mitpress.mit.edu/9780262581080/the-structural-transformation-of-the-public-sphere/>
- Harder, R. A., Sevenans, J., & Van Aelst, P. (2017). Intermedia agenda setting in the lightning age: Digital game changers in the relationship between mainstream media and social media. *Journalism Studies*, 18(3), 275–293. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1054171>
- Huckin, T. (2002). Textual silence and the discourse of homelessness. *Discourse & Society*, 13(3), 347–372. <https://doi.org/10.1177/0957926502013003004>
- IDN Times. (2026, 6 Juni). Polemik film Pesta Babi, publik dinilai perlu hormati sikap Mama Sinta. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/polemik-film-pesta-babi-publik-dinilai-perlu-hormati-sikap-mama-sinta-00-jkxzp-fzvwxwt>
- Irawanto, B., & Octastefani, T. (2019). Sinema dokumenter dan gerakan sosial: Menelaah aktivisme sinematik di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 115–130. <https://doi.org/10.22146/jsp.38573>
- Jackson, S. J., & Foucault Welles, B. (2015). Hijacking #myNYPD: Social media routing and networked counterpublics. *Journal of Communication*, 65(6), 939–962. <https://doi.org/10.1111/jcom.12185>
- Kompas.com. (2026, 13 Mei). Sikap negara respons polemik nobar film Pesta Babi, pelarangan tak bisa dilakukan sembarangan. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/13/05394841/sikap-negara-respons-polemik-nobar-film-pesta-babi-pelarangan-tak-bisa?page=all>
- Kompas.com. (2026, 25 Mei). Salah kaprah menggugat Pesta Babi dan etika republik. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/25/05242951/salah-kaprah-menggugat-pesta-babi-dan-etika-republik?page=all>
- Kompas.com. (2026, 3 Juni). Dandhy nilai polemik pelaporan film Pesta Babi menggeser isu Papua. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/03/08595441/dandhy-nilai-polemik-pelaporan-film-pesta-babi-menggeser-isu-papua>

- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- LLDIKTI Wilayah V. (2026, 21 Mei). UMY soroti polemik film Pesta Babi, kritik sosial tak seharusnya dibungkam. <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/umy-soroti-polemik-film-pesta-babi-kritik-sosial-tak-seharusnya-dibungkam>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Meraz, S., & Papacharissi, Z. (2013). Networked framing and gatekeeping: Twitter hashtag networks and the framing of #egypt. *Information, Communication & Society*, 16(2), 138–166. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.701882>
- NU Online. (2026, 16 Mei). Film Pesta Babi: Antara pembangunan dan kezaliman atas tanah adat. <https://islam.nu.or.id/syariah/film-pesta-babi-antara-pembangunan-dan-kezaliman-atas-tanah-adat-nfiMl>
- NU Online. (2026, 18 Mei). Pesta Babi di pesantren: Ruang belajar santri memahami toleransi, dampak sosial ekologis hingga wajah pemerintah. <https://nu.or.id/daerah/pesta-babi-di-pesantren-ruang-belajar-santri-memahami-toleransi-dampak-sosial-ekologis-hingga-wajah-pemerintah-yCZQr>
- NU Online. (2026, 26 Juni). Film Pesta Babi bongkar kerusakan hutan Papua, Greenpeace soroti perampasan tanah adat demi PSN. <https://nu.or.id/nasional/film-pesta-babi-bongkar-kerusakan-hutan-papua-greenpeace-soroti-perampasan-tanah-adat-demi-psn-eD0t4>
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Silalahi, W., & Go, W. (2026). Pesta Babi dan deforestasi hutan adat Papua: Analisis yuridis perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(3), 1166–1178. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1496/1166>
- Tempo.co. (2026, 11 Mei). YLBHI: Pembubaran nobar film Pesta Babi melanggar UUD 1945. <https://www.tempo.co/hukum/ylbhi-pembubaran-nobar-film-pesta-babi-melanggar-uud-1945-2135058>
- Tempo.co. (2026, 13 Mei). Keliru narasi agenda nonton bareng film Pesta Babi hanya hoaks. <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-narasi-agenda-nonton-bareng-film-pesta-babi-hanya-hoaks-2135549>
- Tempo.co. (2026, 12 Mei). Nobar Pesta Babi, Puan: Kalau sensitif, harus diantisipasi. <https://www.tempo.co/politik/nobar-pesta-babi-puan-kalau-sensitif-harus-diantisipasi-2135318>

- Tempo.co. (2026, 23 Mei). Di balik layar Pesta Babi. <https://www.tempo.co/teroka/di-balik-layar-pesta-babi-2137647>
- Tempo.co. (2026, 23 Mei). Problem persetujuan hukum aktor film dokumenter Pesta Babi. <https://www.tempo.co/hukum/yasinta-moiwend-di-pesta-babi-2139221>
- Tempo.co. (2026, 23 Mei). Proyek food estate berlanjut seiring film Pesta Babi meluas. <https://www.tempo.co/lingkungan/film-pesta-babi-penambahan-alat-berat-food-estate-2138096>
- Tempo.co. (2026, 29 Mei). Pesta Babi, oligarki, dan pelemahan otonomi daerah. <https://www.tempo.co/kolom/pesta-babi-oligarki-otonomi-daerah-2138696>
- Tempo.co. (2026, 30 Mei). Tim film Pesta Babi hormati laporan Mama Yasinta ke polisi. <https://www.tempo.co/politik/tim-film-pesta-babi-hormati-laporan-mama-yasinta-ke-polisi-2139037>
- Tempo.co. (2026, 7 Juni). Bisakah pembuat film Pesta Babi digugat memakai UU PDP? <https://www.tempo.co/politik/uu-pers-data-pribadi-pesta-babi-2253329>
- Tempo.co. (2026, 9 Juni). Sutradara Pesta Babi: Penjajahan terparah terjadi di Papua. <https://www.tempo.co/wawancara/kolonialisme-di-papua-sutradara-film-pesta-babi-2253871>
- Tirto.id. (2026, 11 Mei). Apa isi film dokumenter Pesta Babi sampai nobarnya dibubarkan? <https://tirto.id/apa-isi-film-dokumenter-pesta-babi-sampai-nobarnya-dibubarkan-hvVS>
- Tirto.id. (2026, 11 Mei). TNI klaim bubarkan nobar Pesta Babi imbas tak berizin & isu SARA. <https://tirto.id/tni-klaim-bubarkan-nobar-pesta-babi-imbis-tak-berizin-isu-sara-hv1P>
- Tirto.id. (2026, 12 Mei). Puan soal larangan nobar film Pesta Babi: Akan ditindaklanjuti. <https://tirto.id/puan-soal-larangan-nobar-film-pesta-babi-akan-ditindaklanjuti-hv1S>
- Tirto.id. (2026, 12 Mei). Pigai: Pelarangan nobar film harus melalui keputusan pengadilan. <https://tirto.id/pigai-pelarangan-nobar-film-harus-melalui-keputusan-pengadilan-hv2Q>
- Tirto.id. (2026, 14 Mei). Alasan ISBI Bandung larang pemutaran film dokumenter Pesta Babi. <https://tirto.id/alasan-isbi-bandung-larang-pemutaran-film-dokumenter-pesta-babi-hwbl>
- Tirto.id. (2026, 18 Mei). Alasan penundaan nobar film Pesta Babi di Unpad meski ada izin. <https://tirto.id/alasan-penundaan-nobar-film-pesta-babi-di-unpad-meski-ada-izin-hwfn>
- Tirto.id. (2026, 19 Mei). KSAD soal film Pesta Babi: Duitnya dari mana? Coba pikir aja. <https://tirto.id/ksad-soal-film-pesta-babi-duitnya-dari-mana-coba-pikir-aja-hwoy>

Tirto.id. (2026, 29 Mei). Admin @TheKerupuk jadi tersangka UU ITE, tidak ditahan penyidik.
<https://tirto.id/admin-atthekerupuk-jadi-tersangka-uu-ite-tidak-ditahan-penyidik-hzQE>

Tirto.id. (2026, 3 Juni). Tidak benar, Dandhy Laksono temui miliarder Amerika Serikat.
<https://tirto.id/tidak-benar-dandhy-laksono-temui-miliarder-amerika-serikat-hxi7>

Tuchman, G. (1978). Making news: A study in the construction of reality. Free Press.

Yulianto, H., & Iskandar, H. M. (2026). Analisis semiotik makna judul dan representasi konflik dalam film dokumenter Pesta Babi. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 4(3), 244–252.
<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v4i3.2357>